



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

---

Tahun Sidang : 2010 – 2011  
Masa Sidang : IV  
Rapat : Ke-  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Hari/Tanggal : Kamis, 14 Juli 2011  
Sifat : Terbuka  
Pukul : 10.00 WIB s.d 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)  
Acara : 1. Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester II;  
2. Pembahasan Laporan Keuangan Negara Tahun 2010  
Ketua Rapat : Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow  
Sekretaris : Dra. Hani Yuliasih  
Hadir Anggota : dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI  
Hadir Mitra : Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Negara Perumahan Rakyat, dan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal beserta jajaran terkait lainnya.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Ketua membuka rapat pukul 10.00 WIB, setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Negara Perumahan Rakyat, dan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pada hari ini adalah pembahasan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester II dan pembahasan Laporan Keuangan Negara Tahun 2010.
3. Ketua mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI mengapresiasi Kemenpera atas predikat yang diraih dalam audit keuangan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang masing-masing masih mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk terus berupaya meningkatkan predikat tersebut pada masa yang akan datang antara lain dengan meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI), menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara menyeluruh, serta segera menyelesaikan peraturan perundang-undangan yang diperlukan.
2. Komisi V DPR RI mendorong Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk melaksanakan seluruh rekomendasi BPK baik pada Tahun Anggaran 2010 maupun pada Tahun Anggaran sebelumnya agar dapat terwujud Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang transparan dan akuntabel serta kualitas program/kegiatan yang optimal.
3. Komisi V DPR RI mendorong Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk terus meningkatkan kinerjanya dimana sebagian dari indikator kinerja dan realisasi fisik yang telah ditetapkan tercatat masih berada di bawah target capaian.
4. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk segera menyelesaikan proses inventarisasi dan Penilaian Asset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya pada akhir tahun 2012.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 14 Juli 2011

**KETUA RAPAT,**

TTD

**YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

TTD

**DJOKO KIRMANTO**

**MENTERI NEGARA  
PERUMAHAN RAKYAT,**

TTD

**SUHARSO MONOARFA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

TTD

**FREDDY NUMBERI**

**MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL**

TTD

**A. HELMY FAISHAL ZAINI**